


Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Annisa Fitri Luthfi^{1*}, Hendra Riofita²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 94, Pekanbaru

E-mail: annisafitрилuthfi@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6901>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 09 May 2026

Revised: 24 May 2026

Accepted: 16 June 2026

Kata Kunci:

Belanja Langsung,
Belanja Tidak Langsung,
Pertumbuhan Ekonomi,
PDRB, Kebijakan Fiskal
Daerah.

Keywords:

Direct Spending,
Indirect Spending,
Economic Growth,
GRDP, Regional Fiscal
Policy.



ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah daerah, yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten/kota. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel, studi ini mengolah data sekunder dari laporan realisasi APBD dan Badan Pusat Statistik (BPS) selama periode tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah, khususnya belanja langsung yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sebaliknya, belanja tidak langsung (seperti belanja pegawai) cenderung kurang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB). Temuan ini mengindikasikan pentingnya reorientasi kebijakan fiskal daerah agar lebih produktif guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan alokasi belanja untuk sektor-sektor yang produktif dan mengurangi pengeluaran operasional yang konsumtif.

This study aims to analyze the influence of local government spending, consisting of direct and indirect spending, on economic growth at the district/city level. Using a quantitative approach with a panel data regression method, this study processes secondary data from the Regional Budget (APBD) realization report and the Central Statistics Agency (BPS) for a certain period. The results show that government spending, particularly direct spending allocated for infrastructure development and public services, has a positive and significant influence on regional economic growth. Conversely, indirect spending (such as employee spending) tends to have less direct impact on increasing gross regional domestic product (GRDP). This finding indicates the importance of reorienting regional fiscal policy to be more productive in order to encourage inclusive and sustainable economic growth. Regional governments are expected to be able to optimize spending allocations for productive sectors and reduce consumptive operational expenditures.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Annisa Fitri Luthfi, et al (2026). Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah, 4(4) 27327-27339. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6901>

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan kapasitas produksi dan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan melalui kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya dan merancang kebijakan pembangunan, termasuk dalam hal pengalokasian belanja pemerintah.

Belanja pemerintah daerah menjadi instrumen penting dalam mendorong aktivitas ekonomi. Melalui belanja publik, pemerintah dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur, kualitas

pendidikan, layanan kesehatan, serta mendorong investasi. Secara teori, peningkatan belanja pemerintah dapat memberikan efek multiplier terhadap perekonomian, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, efektivitas belanja pemerintah sangat bergantung pada alokasi, efisiensi, dan kualitas pengelolaannya.

Di Indonesia, masih terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antar daerah yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan belanja pemerintah belum sepenuhnya optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata. Beberapa daerah mampu memanfaatkan anggaran secara efektif sehingga mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sementara daerah lainnya masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya kualitas belanja, ketidaktepatan sasaran, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara kedua variabel tersebut serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji seberapa besar kontribusi belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta bagaimana efektivitas alokasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan aktivitas ekonomi di wilayahnya.

Selain itu, konsep efek pengganda atau Multiplier Effect menjelaskan bahwa setiap peningkatan belanja pemerintah akan memberikan dampak berlipat terhadap pendapatan nasional. Hal ini terjadi karena belanja pemerintah akan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang kemudian akan meningkatkan konsumsi dan investasi, sehingga menciptakan siklus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kualitas dan efektivitas belanja pemerintah menjadi sangat penting dalam menentukan besar kecilnya dampak yang dihasilkan.

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan belanja daerah yang baik diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai permasalahan seperti ketidakefisienan, alokasi anggaran yang kurang tepat, serta rendahnya kualitas belanja publik yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, secara teoritis dapat disimpulkan bahwa belanja pemerintah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hubungan antara kedua variabel ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut guna mengetahui sejauh mana kebijakan fiskal daerah mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh belanja pemerintah daerah (baik belanja langsung maupun tidak langsung) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yang umumnya diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan keuangan daerah. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mankiw (2006) menyebutkan bahwa pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya.. Kenaikan pengeluaran yang direncanakan akan menyebabkan peningkatan permintaan agregat. Permintaan agregat akan mendorong produksi barang dan jasa yang akan menyebabkan pendapatan juga akan meningkat

Pengeluaran Pemerintah menurut Sukirno (1994) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional.

Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output. Sukirno (1994) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bahwa peranan atau campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan yaitu apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh kegiatan di pasar bebas, bukan saja perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan. Akan tetapi fluktuasi kegiatan ekonomi yang lebar dari satu periode ke periode lainnya dan ini akan menimbulkan implikasi yang serius kepada kesempatan kerja dan pengangguran dan tingkat angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang tersedia, maka akan menyebabkan semakin meningkatnya total produksidi suatu daerah (Kuncoro, 2004).

Menurut Kuznets dalam Todaro (2003) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Todaro (2003) menyampaikan ada tiga komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara. Pertama, akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal manusia atau sumberdaya manusia. Kedua, pertumbuhan penduduk yang selanjutnya akan menambah jumlah angkatan kerja. Ketiga, kemajuan teknologi yaitu berupa cara-cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani suatu pekerjaan. suatu pekerjaan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian, baik di tingkat nasional maupun regional (daerah). Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan output agregat (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian) atau Produk Domestik Bruto (PDB). PDB sendiri merupakan nilai total seluruh output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian, baik yang dilakukan oleh warga lokal maupun warga asing yang bermukim di negara bersangkutan. Sehingga, ukuran umum yang sering digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDB untuk skala nasional atau persentase perubahan PDRB untuk skala propinsi atau kabupaten/kota. Teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik berkembang sejak tahun 1950-an. Todaro (2003) model pertumbuhan Neo Klasik Solow ini merupakan pengembangan dari formulasi Harrod Domar dengan menambahkan faktor kedua yakni tenaga kerja serta memperkenalkan variabel independen ketiga yakni teknologi ke dalam persamaan pertumbuhan. Dalam bentuknya yang lebih formal model pertumbuhan neo klasik Solow memakai fungsi produksi agregat standar yakni : $Y = Ae^{\mu t} K^{\alpha} L^{1-\alpha}$. Y adalah produk domestik bruto, K adalah stok modal fisik dan modal manusia, L adalah tenaga kerja non terampil, A adalah konstanta yang merefleksikan tingkat teknologi dasar, sedangkan e^{μ} melambangkan konstanta tingkat kemajuan teknologi. Adapun simbol α melambangkan elastisitas output terhadap modal (atau kenaikan GDP yang bersumber dari 1 persen penambahan modal fisik atau modal manusia).

Selain itu, teori pertumbuhan endogen menganalisis pertumbuhan yang bersifat endogen, Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari dalam sistem ekonomi. Teori ini menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh sistem produksi, bukan berasal dari luar sistem. Kemajuan teknologi merupakan hal yang endogen, Pertumbuhan merupakan bagian dari keputusan pelaku-pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam pengetahuan. Model awal dari endogenous growth oleh Romer (1983,1986) menyatakan bahwa long-run growth pada umumnya ditentukan oleh akumulasi pengetahuan. Walaupun ada penambahan ilmu pengetahuan baru menunjukkan diminishing returns pada suatu perusahaan, namun penciptaan ilmu pengetahuan pada suatu perusahaan diasumsikan mempunyai dampak positif secara eksternal pada teknologi produksi perusahaan lain.

Kebijakan fiskal merupakan satu instrumen utama pemerintah dalam mengarahkan perekonomian menuju pertumbuhan yang berkelanjutan. Melalui pengaturan belanja dan penerimaan negara, kebijakan fiskal berperan dalam menjaga stabilitas makroekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, berbagai studi menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang signifikan (Praycilia & Sugiyanto, 2021).

Hasil analisis dengan model VAR dan ECM yang digunakan oleh Praycilia dan Sugiyanto (2021) menunjukkan bahwa belanja pemerintah pusat non-utang dan penerbitan surat berharga negara (SBN) berpengaruh positif pemerintah dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Artinya alokasi belanja yang tepat, khususnya pada sektor-sektor produksi nasional secara berkelanjutan.

Sebaliknya, pembiayaan melalui utang luar negeri menunjukkan pengaruh negatif terhadap PDB, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Hal ini mencerminkan risiko kebijakan fiskal yang tidak berkelanjutan apabila ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri terlalu tinggi. Beban bunga utang dan potensi pelemahan fiskal akibat tekanan pembayaran dapat menghambat kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dalam jangka panjang.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Frieria et al (2024), belanja pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur juga menunjukkan bahwa efektivitas belanja fiskal sangat tergantung pada kualitas alokasinya. Belanja yang tidak di arahkan pada investasi publik atau yang terlalu besar dialokasikan pada belanja rutin kurang produktif cenderung tidak memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, penguatan fungsi alokasi dalam belanja daerah menjadi krusial dalam mendukung agenda pertumbuhan yang inklusif dan berkesinambungan (Frieria et al., 2024).

Implikasi kebijakan dari temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan fiskal yang hati-hati dan berorientasi jangka panjang sangat diperlukan. Pemerintah perlu memperhatikan prinsip fiskal sustainability, yang mensyaratkan bahwa kebijakan fiskal harus dijalankan tanpa meningkatkan beban utang secara berlebihan dan mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan di masa depan (Praycilia & Sugiyanto, 2021). Hal ini juga sejalan dengan undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menetapkan batas defisit anggaran maksimum sebesar 3% dari PDB dan rasio utang tidak lebih dari 60% terhadap PDB.

Dengan demikian, dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang, kebijakan fiskal harus diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan stabilitas ekonomi mikro, dan memelihara keberlanjutan fiskal negara. Konsistensi antara kebijakan belanja dan strategi pembiayaan menjadi kunci keberhasilan kebijakan fiskal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan stabil.

Penelitian yang dilakukan oleh Meliala (2024) di Kabupaten Kepulauan Yapen menunjukkan bahwa baik belanja langsung maupun tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja langsung, yang mencakup pengeluaran untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur, memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan. Sebaliknya, belanja tidak langsung seperti gaji pegawai atau belanja rutin, justru menunjukkan hubungan negatif, menandakan rendahnya efisiensi dalam penggunaan dana tersebut untuk mendorong produktivitas ekonomi.

Temuan serupa juga ditemukan dalam penelitian oleh Ronni et al. (2024) di Kalimantan Tengah. Meskipun terdapat alokasi belanja yang cukup besar dari Dana Perimbangan, banyak daerah justru menunjukkan dominasi belanja operasional dibanding belanja modal. Grafik rasio belanja daerah menunjukkan tren penurunan belanja modal dari tahun ke tahun, yang berimplikasi pada rendahnya efektivitas belanja dalam mendukung pertumbuhan jangka panjang. Ketergantungan tinggi pada belanja rutin dinilai tidak memberikan kontribusi berarti terhadap produktivitas daerah.

Belanja pemerintah daerah memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya pada era desentralisasi fiskal seperti yang diterapkan di Indonesia saat ini. Setelah diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih luas untuk mengelola keuangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi ini menjadikan pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai aktor utama pembangunan ekonomi di wilayah masing-masing.

Dalam perspektif ekonomi publik, belanja pemerintah dipandang sebagai instrumen yang mampu memperbaiki kegagalan pasar (market failure). Mekanisme pasar sering kali tidak mampu menyediakan barang publik secara optimal, seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sarana transportasi. Oleh karena itu, pemerintah hadir melalui pengeluaran publik untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara merata. Pengeluaran tersebut selanjutnya memberikan efek lanjutan terhadap peningkatan aktivitas ekonomi daerah. Menurut teori Keynes, peningkatan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan permintaan agregat. Ketika pemerintah meningkatkan belanja, misalnya melalui pembangunan jalan atau fasilitas publik, maka permintaan terhadap tenaga kerja, bahan bangunan, jasa konstruksi, dan berbagai kebutuhan lainnya akan meningkat. Peningkatan permintaan ini menciptakan tambahan pendapatan bagi masyarakat sehingga konsumsi ikut meningkat. Kondisi tersebut menghasilkan efek berantai (multiplier effect) yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks daerah, belanja pemerintah tidak hanya berdampak pada peningkatan output ekonomi, tetapi juga mempengaruhi distribusi pendapatan masyarakat. Daerah yang mampu mengalokasikan belanja secara efektif cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang pengelolaan anggarannya masih didominasi oleh belanja rutin. Oleh sebab itu, kualitas belanja menjadi faktor penting selain besarnya anggaran yang dimiliki. Belanja langsung merupakan salah satu komponen pengeluaran pemerintah yang memiliki pengaruh paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja ini mencakup berbagai kegiatan yang berkaitan langsung dengan program pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, pengadaan sarana pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan investasi publik lainnya.

Pembangunan infrastruktur merupakan contoh nyata bagaimana belanja langsung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur yang baik akan mempercepat distribusi barang dan jasa, menurunkan biaya transportasi, meningkatkan mobilitas masyarakat, dan menarik investasi dari sektor swasta. Ketika investasi meningkat, kapasitas produksi daerah juga akan bertambah sehingga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan. Sebagai ilustrasi, pembangunan jalan penghubung antarwilayah di suatu kabupaten dapat mempercepat distribusi hasil pertanian menuju pasar. Sebelum adanya pembangunan jalan, petani mungkin menghadapi biaya transportasi yang tinggi serta keterbatasan akses pemasaran. Namun setelah infrastruktur tersedia, biaya distribusi menjadi lebih rendah, harga jual produk meningkat, dan pendapatan masyarakat ikut bertambah. Pada akhirnya kondisi tersebut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain infrastruktur fisik, belanja pemerintah pada sektor pendidikan juga memiliki dampak yang signifikan. Investasi di bidang pendidikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas tenaga kerja menjadi lebih tinggi. Dalam teori pertumbuhan endogen yang dikembangkan Romer, akumulasi pengetahuan dan peningkatan kualitas manusia menjadi faktor utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pendidikan yang berkualitas menghasilkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan lebih baik dalam mengadopsi teknologi, meningkatkan efisiensi produksi, dan menciptakan inovasi. Oleh karena itu, alokasi anggaran pendidikan tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran konsumtif, melainkan investasi jangka panjang yang memberikan dampak terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Demikian pula pada sektor kesehatan. Belanja pemerintah untuk pembangunan rumah sakit, puskesmas, program imunisasi, penyediaan tenaga kesehatan, dan peningkatan fasilitas medis dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Masyarakat yang sehat memiliki produktivitas kerja lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang mengalami keterbatasan kesehatan. Dengan demikian, peningkatan kualitas kesehatan akan memperkuat kapasitas produksi daerah. Di sisi lain, belanja tidak langsung juga memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi meskipun dampaknya tidak secepat belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, subsidi, bantuan sosial, hibah, dan transfer kepada masyarakat. Pengaruh belanja ini lebih banyak terjadi melalui peningkatan konsumsi rumah tangga. Ketika pemerintah membayar gaji pegawai atau memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, maka pendapatan masyarakat meningkat. Pendapatan tersebut kemudian digunakan untuk membeli barang dan jasa sehingga permintaan pasar bertambah. Kenaikan permintaan mendorong pelaku usaha meningkatkan produksi yang akhirnya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, dominasi belanja tidak langsung sering menjadi permasalahan dalam pengelolaan APBD di berbagai daerah di Indonesia. Banyak pemerintah daerah masih mengalokasikan

sebagian besar anggaran untuk belanja pegawai dan operasional birokrasi dibandingkan investasi produktif. Kondisi ini menyebabkan kemampuan anggaran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi kurang optimal. Penelitian Meliala (2024) menunjukkan bahwa belanja langsung memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Yapen, sedangkan belanja tidak langsung cenderung memberikan dampak negatif karena lebih banyak terserap pada kebutuhan administratif dan operasional pemerintah. Temuan ini menunjukkan pentingnya reorientasi anggaran menuju pengeluaran yang bersifat produktif. Hal serupa juga terlihat pada penelitian Ronni et al. (2024) di Kalimantan Tengah yang menemukan bahwa tingginya proporsi belanja rutin menyebabkan rendahnya efektivitas pembangunan ekonomi daerah. Belanja modal mengalami penurunan dari tahun ke tahun sehingga kemampuan daerah dalam meningkatkan produktivitas ekonomi menjadi terbatas.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa besarnya anggaran belum tentu menghasilkan pertumbuhan ekonomi tinggi apabila kualitas penggunaannya masih rendah. Efektivitas pengeluaran pemerintah tidak hanya ditentukan oleh jumlah dana, tetapi juga ketepatan sasaran, efisiensi penggunaan, serta keberhasilan program yang dilaksanakan. Selain faktor alokasi anggaran, pertumbuhan ekonomi daerah juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan. Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi cenderung memiliki kinerja ekonomi lebih baik dibandingkan daerah dengan tata kelola yang lemah. Transparansi memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap program memiliki target dan indikator keberhasilan yang jelas. Sementara efisiensi memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal untuk menghasilkan manfaat terbesar bagi masyarakat.

Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala dalam pengelolaan belanja daerah. Salah satu masalah utama adalah rendahnya serapan anggaran pada awal tahun dan tingginya realisasi pada akhir tahun. Pola ini menyebabkan pembangunan tidak berjalan optimal karena pelaksanaan program menjadi tergesa-gesa. Keterlambatan pelaksanaan anggaran sering terjadi akibat proses administrasi yang panjang, keterlambatan pengadaan barang dan jasa, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Akibatnya, dampak belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi kurang maksimal. Permasalahan lain adalah ketimpangan pembangunan antarwilayah. Daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi umumnya mampu menyediakan infrastruktur dan layanan publik lebih baik dibandingkan daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Ketimpangan ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi antarwilayah menjadi tidak merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah pusat memberikan Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Tujuan kebijakan ini adalah mengurangi kesenjangan fiskal serta meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan.

Meskipun demikian, efektivitas Dana Perimbangan sangat bergantung pada pengelolaannya di tingkat daerah. Jika dana tersebut lebih banyak digunakan untuk belanja operasional, maka dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas. Sebaliknya, apabila dialokasikan pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka kontribusinya terhadap pertumbuhan akan lebih besar. Dalam teori pertumbuhan Neo Klasik Solow, modal fisik, tenaga kerja, dan teknologi menjadi faktor utama pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah berkontribusi terhadap ketiga faktor tersebut. Infrastruktur meningkatkan modal fisik, pendidikan dan kesehatan meningkatkan kualitas tenaga kerja, sedangkan investasi pada inovasi mendorong kemajuan teknologi. Model pertumbuhan endogen bahkan menekankan bahwa investasi pada pengetahuan dan teknologi menjadi sumber utama pertumbuhan jangka panjang. Oleh sebab itu, belanja pemerintah yang diarahkan pada riset, inovasi, digitalisasi, dan pengembangan sumber daya manusia diperkirakan memberikan dampak lebih besar dibandingkan belanja konsumtif. Pada era digital saat ini, pemerintah daerah juga mulai mengalokasikan anggaran untuk transformasi digital pelayanan publik. Penggunaan sistem elektronik dalam administrasi pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, dan mempercepat pelayanan masyarakat. Digitalisasi juga membuka peluang ekonomi baru melalui pengembangan usaha berbasis teknologi.

Selain itu, penguatan sektor UMKM melalui belanja pemerintah menjadi strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. UMKM memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan pembentukan PDRB. Bantuan modal, pelatihan, pendampingan usaha, dan penyediaan fasilitas pemasaran dapat meningkatkan produktivitas UMKM sehingga memberikan dampak positif

terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah pada sektor pertanian juga memiliki peranan penting terutama bagi daerah yang struktur ekonominya masih didominasi sektor primer. Penyediaan irigasi, bantuan alat pertanian, pembangunan jalan produksi, serta peningkatan kapasitas petani dapat meningkatkan hasil produksi dan pendapatan masyarakat. Hubungan antara belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi sebenarnya bersifat dua arah. Di satu sisi, belanja pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga akan memperbesar pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi sehingga kapasitas fiskal bertambah. Dengan demikian tercipta hubungan timbal balik yang saling memperkuat.

Namun apabila pertumbuhan ekonomi rendah sementara belanja pemerintah terus meningkat tanpa pengelolaan yang baik, maka dapat muncul risiko fiskal seperti defisit anggaran dan peningkatan utang. Oleh sebab itu, prinsip keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*) menjadi hal yang penting. Prinsip ini menekankan bahwa pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan pembiayaan. Pengeluaran harus diarahkan pada kegiatan produktif yang menghasilkan manfaat jangka panjang sehingga tidak membebani generasi mendatang. Berdasarkan berbagai teori dan hasil penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi tidak bersifat otomatis. Dampaknya sangat dipengaruhi oleh kualitas kebijakan, struktur anggaran, efektivitas pelaksanaan, dan kondisi ekonomi daerah. Daerah yang berhasil mengalokasikan anggaran secara produktif biasanya menunjukkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Sebaliknya, daerah yang masih didominasi belanja operasional cenderung mengalami pertumbuhan lebih lambat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan reformasi pengelolaan anggaran melalui peningkatan proporsi belanja modal, penguatan evaluasi program, pengurangan belanja yang kurang produktif, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, belanja pemerintah tidak hanya dipandang sebagai aktivitas pengeluaran semata, tetapi sebagai investasi strategis untuk menciptakan pembangunan ekonomi daerah. Pengelolaan yang tepat akan menghasilkan peningkatan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, pemerataan pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebaliknya, pengelolaan yang kurang efektif dapat menyebabkan pemborosan anggaran dan mengurangi kemampuan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang.

Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya dipandang sebagai upaya memperoleh keuntungan material, tetapi juga sebagai sarana mencapai kesejahteraan masyarakat (*falah*) yang mencakup aspek dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kebijakan fiskal pemerintah, termasuk belanja pemerintah daerah, harus diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, serta menjaga kemaslahatan umat. Konsep belanja pemerintah dalam Islam sebenarnya telah dikenal sejak masa pemerintahan Rasulullah SAW dan dilanjutkan pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa tersebut, negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan mendistribusikannya kepada masyarakat melalui berbagai bentuk pengeluaran negara yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan. Pengelolaan keuangan negara dilakukan melalui Baitul Mal, yaitu lembaga yang berfungsi menghimpun dan mendistribusikan kekayaan untuk kepentingan publik.

Belanja negara dalam Islam tidak hanya difokuskan pada kepentingan administratif pemerintahan, tetapi lebih diarahkan pada pembangunan masyarakat, pengentasan kemiskinan, penyediaan fasilitas umum, serta perlindungan terhadap kelompok lemah. Hal ini menunjukkan bahwa konsep belanja pemerintah dalam ekonomi Islam memiliki kesamaan dengan tujuan pembangunan modern, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa pengelolaan harta harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak berlebihan. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Qur'an QS. Al-Isra ayat 26–27:

“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”

Ayat tersebut memberikan penegasan bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan secara efisien dan tepat sasaran. Dalam konteks belanja pemerintah daerah, prinsip ini dapat dimaknai bahwa APBD harus digunakan untuk program yang memberikan manfaat luas kepada masyarakat dan menghindari

pemborosan anggaran. Belanja pemerintah yang terlalu besar pada sektor konsumtif, seperti belanja operasional yang tidak produktif, dapat dipandang bertentangan dengan prinsip efisiensi dalam Islam. Sebaliknya, pengeluaran yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lebih sesuai dengan konsep masalah karena memberikan manfaat jangka panjang. Konsep masalah menjadi dasar penting dalam ekonomi Islam. Menurut pemikiran Al-Ghazali, tujuan utama syariat adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan (maqashid syariah), yaitu menjaga agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Belanja pemerintah yang baik harus mampu mendukung tercapainya lima tujuan tersebut.

Belanja pendidikan, misalnya, berkaitan dengan perlindungan akal (hifz al-aql). Pemerintah yang mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan sekolah, peningkatan mutu guru, bantuan pendidikan, serta pengembangan teknologi sebenarnya sedang menjalankan fungsi syariah dalam menjaga dan meningkatkan kualitas intelektual masyarakat. Sementara itu, belanja kesehatan berkaitan dengan perlindungan jiwa (hifz an-nafs). Penyediaan rumah sakit, puskesmas, fasilitas kesehatan, serta program pelayanan masyarakat merupakan bentuk implementasi nilai Islam dalam menjaga kehidupan manusia. Belanja sosial dan bantuan kepada masyarakat miskin juga memiliki landasan kuat dalam Islam. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan kelompok penerima zakat, termasuk fakir dan miskin. Prinsip ini menunjukkan bahwa distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil agar tidak terjadi ketimpangan sosial. Dalam konteks modern, bantuan sosial pemerintah daerah dapat dipandang sebagai bentuk distribusi kesejahteraan yang sejalan dengan nilai ekonomi Islam selama dilakukan secara adil, transparan, dan tidak disalahgunakan. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya keadilan dalam pengelolaan ekonomi. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 90:

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah harus berlandaskan keadilan. Dalam pengelolaan belanja daerah, keadilan dapat diwujudkan melalui pemerataan pembangunan antarwilayah, pengurangan kesenjangan ekonomi, serta peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan. Ketimpangan pembangunan antar daerah yang masih terjadi di Indonesia menunjukkan pentingnya penerapan prinsip keadilan dalam distribusi anggaran. Daerah terpencil sering menghadapi keterbatasan infrastruktur dan layanan publik sehingga pertumbuhannya tertinggal dibanding daerah maju. Dalam perspektif Islam, kondisi seperti ini memerlukan intervensi pemerintah agar tercipta keseimbangan dan pemerataan. Konsep pemerataan dalam ekonomi Islam juga terlihat pada larangan penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hasyr ayat 7:

“...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”

Ayat tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kebijakan fiskal modern. Belanja pemerintah seharusnya tidak hanya memberikan manfaat kepada kelompok tertentu, tetapi harus mampu menciptakan distribusi ekonomi yang merata. Misalnya, pembangunan jalan desa, pasar rakyat, irigasi pertanian, bantuan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk pengeluaran yang mampu mendistribusikan manfaat ekonomi secara luas. Program tersebut sejalan dengan prinsip Islam yang menghendaki pemerataan kesejahteraan. Dalam sejarah Islam, praktik pengelolaan fiskal yang efektif pernah diterapkan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Pada masa pemerintahannya dilakukan pembangunan infrastruktur, irigasi, jalan, sistem administrasi keuangan, serta pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong kesejahteraan rakyat melalui pengeluaran publik. Bahkan pada masa itu dibentuk sistem pencatatan keuangan yang tertib untuk memastikan distribusi anggaran berjalan secara efektif. Prinsip transparansi yang diterapkan oleh Umar bin Khattab memiliki kesamaan dengan konsep akuntabilitas publik dalam pengelolaan APBD saat ini. Pemerintah daerah dituntut untuk menggunakan anggaran secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Islam juga melarang penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan harta negara. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil...”

Ayat ini memberikan peringatan bahwa penyimpangan anggaran, korupsi, dan pemborosan merupakan tindakan yang bertentangan dengan syariat. Dalam konteks belanja pemerintah daerah, korupsi menyebabkan anggaran pembangunan tidak berjalan optimal sehingga pertumbuhan ekonomi terhambat. Ketika dana pembangunan disalahgunakan, infrastruktur menjadi tidak maksimal, pelayanan publik menurun, dan kesejahteraan masyarakat sulit meningkat. Oleh karena itu, penerapan nilai kejujuran (amanah) menjadi sangat penting dalam pengelolaan fiskal. Konsep amanah dalam Islam mengharuskan pemerintah memandang anggaran sebagai titipan masyarakat yang harus digunakan untuk kepentingan umum. Setiap pengeluaran harus dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun secara moral di hadapan Allah SWT. Selain amanah, Islam juga mengenal konsep ihsan, yaitu melakukan pekerjaan secara optimal dan berkualitas. Dalam pengelolaan belanja daerah, prinsip ini dapat diwujudkan melalui perencanaan program yang matang, evaluasi berkala, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dalam Islam juga berbeda dengan ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional sering menilai keberhasilan pembangunan hanya dari peningkatan PDB atau PDRB, sedangkan Islam menilai keberhasilan melalui keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan kesejahteraan sosial. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi diikuti ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran tidak sepenuhnya dianggap berhasil dalam perspektif Islam. Sebaliknya, pertumbuhan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mengurangi kesenjangan lebih sesuai dengan tujuan syariah. Konsep ini sangat relevan dengan penelitian mengenai pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja pemerintah tidak cukup hanya meningkatkan angka PDRB, tetapi juga harus menghasilkan pemerataan manfaat ekonomi.

Dengan demikian, belanja langsung pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dipandang sebagai implementasi nilai maqashid syariah. Sementara itu, pengelolaan anggaran yang transparan, efisien, dan bebas korupsi merupakan bentuk penerapan prinsip amanah dan keadilan dalam Islam. Secara keseluruhan, kajian Islam menunjukkan bahwa belanja pemerintah memiliki kedudukan penting sebagai sarana mencapai falah atau kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah yang produktif akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, serta menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan anggaran melalui prinsip keadilan, efisiensi, amanah, transparansi, serta orientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dengan penerapan prinsip tersebut, pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak hanya bersifat material, tetapi juga mampu mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Analisis mengenai pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari berbagai teori ekonomi yang menjelaskan hubungan antara pengeluaran pemerintah dan aktivitas ekonomi. Beberapa teori yang relevan dalam menjelaskan hubungan tersebut antara lain teori Keynes, teori pertumbuhan Harrod-Domar, teori pertumbuhan Neo Klasik Solow, teori pertumbuhan endogen, teori Wagner, dan teori Multiplier Effect. Teori-teori ini memberikan landasan konseptual untuk memahami bagaimana belanja pemerintah mampu mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Belanja Pemerintah Menurut Teori Keynes

Teori Keynes yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes menjelaskan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam mengendalikan perekonomian melalui kebijakan fiskal. Menurut Keynes, perekonomian tidak selalu mampu mencapai kondisi keseimbangan secara otomatis melalui mekanisme pasar. Oleh karena itu, intervensi pemerintah diperlukan untuk meningkatkan permintaan agregat. Dalam konteks penelitian ini, belanja pemerintah daerah melalui APBD berfungsi sebagai stimulus ekonomi. Misalnya pembangunan jalan, jembatan, pasar, sekolah, dan rumah sakit akan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Dampak lanjutan dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya PDRB daerah.

Menurut Keynes, saat investasi swasta menurun atau aktivitas ekonomi melemah, pemerintah perlu meningkatkan belanja publik untuk menjaga stabilitas ekonomi. Oleh sebab itu, belanja pemerintah menjadi instrumen penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Teori Harrod-Domar dan Hubungan Belanja Pemerintah dengan Investasi

Teori Harrod-Domar menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh investasi dan akumulasi modal. Model ini menekankan bahwa semakin besar investasi yang dilakukan, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai. Dalam teori ini, belanja pemerintah yang berbentuk pembangunan infrastruktur dapat dipandang sebagai investasi publik. Infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, jaringan irigasi, pasar, dan sarana transportasi meningkatkan stok modal daerah sehingga kapasitas produksi meningkat.

Sebagai contoh, pembangunan irigasi oleh pemerintah daerah akan meningkatkan hasil pertanian. Produksi pertanian yang meningkat menyebabkan pendapatan masyarakat naik dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

Belanja modal pemerintah juga mampu menarik investasi swasta. Ketika infrastruktur suatu daerah berkembang, investor akan lebih tertarik menanamkan modal karena biaya produksi menjadi lebih rendah. Dengan demikian, belanja pemerintah tidak hanya memberikan dampak langsung tetapi juga menciptakan investasi lanjutan.

Teori Harrod-Domar mendukung hasil penelitian bahwa belanja langsung memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena berfungsi sebagai pembentukan modal daerah.

Teori Pertumbuhan Neo Klasik Solow

Teori pertumbuhan Neo Klasik dikembangkan oleh Robert Solow yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh modal, tenaga kerja, dan teknologi. Pertama, belanja modal meningkatkan stok modal fisik melalui pembangunan infrastruktur. Kedua, belanja pendidikan dan kesehatan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Ketiga, investasi pemerintah pada teknologi dan digitalisasi meningkatkan efisiensi ekonomi. Menurut Solow, pertumbuhan ekonomi jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh penambahan modal tetapi juga oleh perkembangan teknologi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran tidak hanya pada pembangunan fisik tetapi juga inovasi dan pengembangan sumber daya manusia. Belanja pemerintah pada pendidikan, pelatihan kerja, laboratorium, digitalisasi pelayanan publik, dan pengembangan teknologi daerah menjadi sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Teori Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan endogen dikembangkan oleh Paul Romer yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi berasal dari faktor internal seperti ilmu pengetahuan, inovasi, teknologi, dan kualitas sumber daya manusia. Berbeda dengan teori Neo Klasik yang menganggap teknologi berasal dari luar sistem ekonomi, teori endogen memandang teknologi sebagai hasil investasi yang dilakukan masyarakat dan pemerintah. Dalam teori ini, pemerintah mempunyai peranan besar karena dapat meningkatkan pertumbuhan melalui:

1. Investasi pendidikan
2. Pengembangan penelitian
3. Dukungan inovasi
4. Pengembangan teknologi
5. Pelatihan tenaga kerja

Belanja pemerintah pada sektor pendidikan menjadi investasi yang menghasilkan human capital. Semakin tinggi kualitas pendidikan masyarakat maka semakin tinggi produktivitas tenaga kerja. Misalnya pemerintah daerah membangun sekolah, laboratorium, perpustakaan, pusat pelatihan, dan fasilitas teknologi informasi. Program tersebut meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga produktivitas ekonomi daerah ikut meningkat. Teori ini sangat sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan karena menempatkan manusia sebagai faktor utama pertumbuhan ekonomi.

Teori Wagner tentang Peningkatan Pengeluaran Pemerintah

Teori Wagner atau Wagner's Law dikemukakan oleh Adolph Wagner yang menyatakan bahwa semakin maju suatu perekonomian maka semakin besar pula pengeluaran pemerintah. Menurut Wagner, pertumbuhan ekonomi menyebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Infrastruktur
4. Administrasi publik

5. Pelayanan sosial

Akibatnya, pemerintah harus meningkatkan belanja untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam konteks daerah, peningkatan PDRB biasanya diikuti peningkatan APBD. Daerah yang ekonominya berkembang akan membutuhkan lebih banyak sekolah, rumah sakit, fasilitas umum, transportasi, dan layanan sosial.

Teori Wagner menjelaskan hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah. Di satu sisi belanja pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain pertumbuhan ekonomi juga menyebabkan kebutuhan belanja pemerintah semakin besar. Dengan demikian, peningkatan pengeluaran pemerintah merupakan konsekuensi alami dari proses pembangunan ekonomi.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dapat disimpulkan bahwa belanja pemerintah memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu instrumen utama dalam mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di daerah. Belanja pemerintah, baik dalam bentuk belanja langsung maupun belanja tidak langsung, memberikan kontribusi yang berbeda namun saling melengkapi dalam proses pertumbuhan ekonomi.

Belanja langsung, seperti belanja modal untuk pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, fasilitas publik), terbukti memberikan dampak secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena pembangunan infrastruktur mampu meningkatkan konektivitas, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong masuknya investasi. Dengan demikian, produktivitas daerah meningkat dan output ekonomi (PDRB) mengalami kenaikan.

Sementara itu, belanja tidak langsung, seperti gaji pegawai, subsidi, dan bantuan sosial, memberikan pengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Melalui peningkatan pendapatan masyarakat, belanja ini mampu meningkatkan daya beli dan konsumsi. Konsumsi masyarakat yang meningkat kemudian akan mendorong permintaan barang dan jasa, sehingga pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah secara bertahap.

Selain itu, efektivitas belanja pemerintah juga sangat bergantung pada pengelolaan yang tepat, transparan, dan tepat sasaran. Jika alokasi belanja tidak optimal atau tidak efisien, maka dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi akan kurang maksimal. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan pengawasan yang baik agar setiap pengeluaran pemerintah benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Dari sisi teori ekonomi, hasil penelitian ini sejalan dengan teori Keynes yang menjelaskan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar menunjukkan bahwa investasi publik melalui belanja pemerintah berperan dalam pembentukan modal dan peningkatan output ekonomi. Sementara teori Neo Klasik Solow menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh modal, tenaga kerja, dan teknologi yang semuanya dapat diperkuat melalui kebijakan belanja pemerintah. Teori pertumbuhan endogen juga memperlihatkan bahwa investasi pada pendidikan, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia menjadi faktor utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Selain ditinjau dari perspektif ekonomi modern, penelitian ini juga menunjukkan bahwa konsep belanja pemerintah memiliki keterkaitan yang kuat dengan prinsip ekonomi Islam. Dalam Islam, pengelolaan keuangan negara harus didasarkan pada nilai masalah (kemanfaatan), keadilan, efisiensi, amanah, dan keseimbangan distribusi kesejahteraan. Belanja pemerintah diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk mewujudkan falah, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat.

Konsep maqashid syariah menjelaskan bahwa pengeluaran negara seharusnya mendukung perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, alokasi anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan bentuk implementasi nilai-nilai Islam dalam pembangunan ekonomi daerah. Islam juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran sehingga praktik pemborosan, korupsi, dan penyalahgunaan dana publik harus dihindari.

Secara keseluruhan dapat ditegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan belanja pemerintah. Besarnya anggaran tidak selalu menjamin tingginya

pertumbuhan ekonomi apabila alokasinya belum tepat sasaran. Sebaliknya, pengelolaan anggaran yang efektif, produktif, transparan, dan berorientasi pada pembangunan manusia akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pemerintah daerah perlu melakukan reorientasi kebijakan fiskal melalui peningkatan proporsi belanja produktif, penguatan investasi publik, pengurangan pengeluaran konsumtif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penerapan prinsip tata kelola yang baik. Integrasi antara teori ekonomi modern dan nilai ekonomi Islam diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan belanja pemerintah yang tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memperkuat pemerataan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan kesimpulan mengenai pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan agar kebijakan belanja pemerintah lebih efektif dan berdampak optimal.

Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan proporsi belanja langsung, khususnya pada sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini penting karena belanja langsung memiliki dampak yang lebih cepat dan nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kedua, pengelolaan belanja tidak langsung harus dilakukan secara lebih efisien dan tepat sasaran. Pemerintah perlu memastikan bahwa pengeluaran seperti gaji, subsidi, dan bantuan sosial benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mampu meningkatkan daya beli tanpa membebani anggaran secara berlebihan. Ketiga, diperlukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Dengan adanya pengawasan yang baik, potensi penyalahgunaan anggaran dapat diminimalkan sehingga belanja pemerintah benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan ekonomi. Keempat, pemerintah daerah sebaiknya melakukan perencanaan anggaran yang berbasis kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Hal ini bertujuan agar setiap pengeluaran memiliki dampak yang jelas terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Terakhir, disarankan adanya evaluasi secara berkala terhadap efektivitas belanja pemerintah. Dengan evaluasi ini, pemerintah dapat mengetahui program mana yang berhasil dan mana yang perlu diperbaiki, sehingga kebijakan yang diambil ke depannya menjadi lebih tepat dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Hendra Riofita, M.M., selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Publik, atas bimbingan, masukan, dan ilmu yang beliau berikan selama proses penyusunan jurnal ini. Berkat arahan dan dukungan beliau, penulis dapat menyelesaikan jurnal ini dengan baik serta memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai materi perkuliahan.

REFERENSI

- Hidayat, A. S., & Nalle, F. W. (2015). Analisis pengaruh belanja pemerintah, tenaga kerja, dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi regional Provinsi Jawa Timur tahun 2010–2015. *Jurnal Ekonomi Regional*, 10(2), 76-78
- H. Riofita, “Analisis pelayanan prima dan kualitas pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau,” *JPEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen dan Keuangan*, vol. 2, no. 1, pp. 29–48, 2018. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpeka/article/view/2472>
- H. Riofita, “Bentuk Peranan Guru dalam Memberikan Pendidikan Kepemimpinan,” *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, vol. 2, no. 1, Jun. 2016. https://www.researchgate.net/publication/323879373_bentuk_peranan_guru_dalam_memberikan_pendidikan_kepemimpinan
- H. Riofita, “Perceived Opportunity and Risk Control Role on Willingness to Recommend Sharia Fintech,” *Jurnal Ekonomi Indonesia*, vol. 13, no. 2, 2024. <https://jurnal.isei.or.id/index.php/isei/article/view/353>
- Nurmainah, S. (2013). Analisis pengaruh belanja modal pemerintah daerah, tenaga kerja terserap dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan (Studi kasus 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 20(2), 131–141.

Simanjuntak, G. Y., Yulika, M., Putri, D. N., & Pangestoeti, W. (2025). Pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(6), 260–273.